Kebijakan dan Kiat Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam Meningkatkan Daya Tarik Investasi

(Wednesday, 25 January 2006) - Contributed by Drs. H. Lily Hambali Hasan, MSi (Bupati Purwakarta) - Last Updated ()

purwakarta.go.id ~ Sebagai konsekuensi dari penetapan kebijakan otonomi daerah, kebijakan pembangunan mengalami perubahan konsep yang cukup mendalam, yaitu dari “pembangunan daerah” menjadi “daerah membangun”. Hal ini membawa konsekuensi bahwa pemerintah daerah harus memiliki daya dan upaya sendiri untuk dapat membangun daerahnya secara mandiri. Dengan perubahan konsep tersebut, berarti diperlukan daya dan upaya untuk mengoptimalisasikan segenap potensi daerah sehingga dapat mendukung terlaksananya konsep “daerah membangun” secara benar dan bertanggung jawab.

Ekonomi, sebagai salah satu komponen pembangunan yang paling peka terhadap kebutuhan hidup, dalam pengembangan konsep pembangunannya akan memiliki “warna” perubahan tersendiri, yang tentunya akan berbeda dengan konsep-konsep pembangunan bidang lainnya, seperti pembangunan fisik atau pembangunan sosial politik. Hal utama yang menyebabkan perbedaan warna tersebut adalah adanya mekanisme pasar yang berpengaruh sangat kuat terhadap pembangunan ekonomi, baik nasional maupun daerah.

Dalam rangka optimalisasi segenap potensi daerah, pembangunan ekonomi daerah harus dilakukan melalui pendekatan optimalisasi peran ketiga unsur pelaku pembangunan, yaitu pemerintah, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Unsur pemerintah terutama sekali terdiri dari institusi-institusi sektor publik. Sektor swasta mencakup perusahaan-perusahaan besar, menengah dan kecil, baik formal maupun non-formal, yang bekerja melalui mekanisme pasar. Organisasi masyarakat sipil mencakup kelompok-kelompok yang dibentuk secara sukarela oleh warga masyarakat. Didalamnya termasuk serikat pekerja, asosiasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, partai politik dan lain sebagainya. Pembangunan ekonomi yang dinamis, saling mengimbangi, saling mendukung, saling mengendalikan, dan saling melengkapi akan ditentukan oleh intensitas dan kualitas interaksi diantara ketiganya.

Dalam rangka operasionalisasi pendekatan optimalisasi di atas, daerah haruslah mulai menggeser pendekatannya dalam mengelola dan mengembangkan ekonomi daerah dari “pendekatan birokratik” ke “pendekatan strategis entrepreneurial”. Pendekatan birokratik adalah pendekatan pengelolaan ekonomi daerah yang “kaku” karena selalu berorientasi kepada prosedur dan aturan baku birokrasi, yang menyebabkan ekonomi daerah kehilangan kepekaannya terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat atau pelanggannya. Pendekatan “strategik enterpreneurial”, sebaliknya dari pendekatan birokratik, bersifat pragmatis karena selalu berorientasi kepada hasil dan peka terhadap setiap peluang; selalu fokus kepada kebutuhan dan ekspektasi masyarakat dan pelanggannya. Dan tak kalah dari pendekatan ini adalah responsif kepada setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan makro.

Pendekatan strategik-enterpreneurial menuntut dipenuhinya elemen penting berikut dalam perencanaan daerah :

Pertama, adanya penetapan visi dan tujuan pembangunan jangka menengah/panjang daerah;
Kedua, upaya membangun budaya enterpreneurial kepada segenap SDM daerah;
Ketiga, perumusan strategi pembangunan daerah yang marketable, profitable untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare)

Dengan tiga elemen ini, alokasi sumber daya daerah akan efektif dan terarah, sehingga keunggulan bersaing daerah dapat dibangun. Memperhatikan hal tersebut, dikaitkan dengan kondisi empat core business yang perlu kita kembangkan yaitu agribisnis, industri, pariwisata dan perdagangan & jasa maka untuk langkah pengembangan dan penguatan perlu dikaji posisioning masing core dan langkah-langkah sistematis yang perlu dilaksanakan antara lain melalui kebijakan pemerintah dalam bidang investasi (penanaman modal). Hal inilah yang mendorong Pemerintah Daerah Purwakarta memperoleh penghargaan KKPOD Award dua kali pada tahun 2003 dan 2004, sebagai Kabupaten yang mempunyai daya tarik investasi di Indonesia.

2.   Pembiayaan Pembangunan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka salah satunya daerah diharapkan mampu menyusun anggarannya dengan prinsip-prinsip anggaran kinerja (budget performance), yaitu anggaran terkait dengan hasil yang ingin dicapai.

Dalam penganggaran pemerintah daerah dituntut untuk menyertakan informasi tentang sasaran, tujuan, prioritas pada tahun fiskal tertentu. Dengan demikian anggaran kinerja menghubungkan pengeluaran dengan hasil yang diinginkan. Mengacu kepada tugas-tugas di atas pada satu sisi dan pada sisi lain relative pendeknya masa pengalaman kabupaten/kota dalam melakukan perencanaan secara mandiri dalam masa otonomi daerah ini, maka penyusunan prioritas program/kegiatan dirasakan menjadi sangat penting. Terlebih lagi pada umumnya daerah memiliki keterbatasan dana, sedangkan pengajuan pembiayaan program (kegiatan) pada umumnya melebihi kapasitas tersebut. Karena itu daerah harus mengembangkan model penganggaran untuk belanja tiap unit satuan kerja agar alokasi APBD mendukung pembelanjaan yang efektif dan efisien.

Menurut Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yang berkaitan dengan anggaran kinerja diarahkan bahwa dalam pemilihan program/kegiatan serta penganggaran daerah harus terukur dan menyertakan kegiatan yang menjadi skala prioritas, kebutuhan atau tugas pokok dan fungsi dari lembaga pemerintah. Pada langkah-langkah pemilihan program/kegiatan seta penganggaran tersebut dicantumkan Visi-Misi daerah sampai dengan tujuan kegiatan sehingga tersusun anggaran. Untuk mengerucutkan kegiatan agar mendukung Visi-Misi secara efektif dan efisien daerah memerlukan langkah yang

lebih operasional, yaitu secara keseluruhan dan integratif menyusun prioritas dan memilih program/kegiatan, serta menetapkan anggarannya.
Beberapa hal penting dalam kerangka pikir ini adalah:

a. Pemahaman Visi-Misi Kabupaten Purwakarta
b. Penilaian (Assessment) atas situasi kondisi kondisi sampai saat ini dan diperbandingkan dengan perkiraan dan harapan beberapa tahun kedepan. Dari langkah ini dapat diidentifikasi profil Kabupaten Purwakarta, selisih pendptan dan belanja serta langkah atau strategi yang harus dilakukan.
c. Kondisi-kondisi diatas menjadi dasar penentuan kriteria program/kegiatan.
d. Menurut kriteria tersebut kemudian disusun prioritas kegiatan pada tahun anggaran tertentu.
e. Anggaran (APBD) yang tersedia sangat terbatas.
f. Dari aspek pengorganisasian juga dipertimbangkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) unit kerja serta ketersediaan SDM-nya.
g. Proses berikutnya adalah sampai anggaran tersusun dilakukan menurut mekanisme Kepmendagri N0.29 Tahun 2002.

Perkembangan pembiayaan pembangunandi Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2004 dan Tahun Anggaran 2005 menunjukan bahwa pembiayaan terbesar bersumber dana dari Pemerintah Pusat berupa DAU dan DAK sekitar 60,8 % sedangkan kemampuan pendapatan asli daerah sendiri hanya sekitar 11,89 % hal ini menunjukan bahwa ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah masih besar terhadap pemerintah pusat, oleh karenanya kecenderungan ini perlu dikaji secara mendalam dan menyeluruh guna mengoptimalkan peran daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

3. Kondisi Perekonomian Regional Purwakarta
Kinerja pembangunan perekonomian daerah Kabupaten Purwakarta dapat dilihat dari kemampuan produksi daerah. Berdasarkan PDRB menurut Lapangan Usaha Tahun 2003 Berdasarkan Harga Konstan sebesar Rp. 2.146.929.940.000,00 (Dua Trilyun Seratus Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan PDRB Berdasarkan Harga Berlaku sebesar Rp. 6.279.186.050.000,00 (Enam Trilyun Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan pertumbuhan ekonomi rata-raa sekitar 3,28 %. Dari 9 lapangan usaha, Sektor Industri Pengolahan mempunyai distribusi prosentase yang terbesar 41,89%. Hal ini disebabkan perkembangan industri yang cepat dengan adanya fasilitas kawasan industri seluas 2.000 Ha sudah terbangun 121,75 Ha dan zona industri seluas 3.000 Ha sudah terbangun 646,9 Ha. Diikuti kemudian oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 27,03%, dan sektor pertanian sebesar 8,51%.
Berdasarkan catatan Tahun 2002 angkatan kerja di Kabupaten Purwakarta berjumlah 17.479 (Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan) jiwa, sedangkan Tahun 2003 berjumlah 36.483 (Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga) jiwa, atau mengalami pertumbuhan 108,72 % dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pencari kerja terdaftar pada Tahun 2003 berjumlah 11.632 (Sebelas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua) orang, terjadi kenaikan 1.052 (Seribu Lima Puluh Dua) orang atau 9,94 % dibanding Tahun 2002 yang berjumlah 10.580 (Sepuluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh) orang.
Dengan terjadinya transformasi struktur ekonomi diharapkan struktur ketenagakerjaan juga mengalami pergeseran. Menurunnya peranan sektor primer, seharusnya diikuti dengan penurunan proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut. Tetapi proses tersebut bisa tidak terjadi disebabkan oleh pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja yang rendah dan karakteristik sektor industri yang tidak labor intensif. Dalam kondisi ini diperlukan tingkat pertumbuhan sektor yang lebih tinggi agar mampu menyerap tenaga kerja. Karakteristik dan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Purwakarta, diharapkan mampu mendorong kegiatan-kegiatan utama di bidang ekonomi.
Perkembangan investasi pada tahun 2003 mencapai sebesar Rp. 9,4 trilyun yang terdiri dari investasi swasta sebesar Rp 2,3 trilyun (32 %), investasi masyarakat sebesar Rp. 6,7 trilyun (64,61 %) dan investasi pemerintah sekitar Rp. 327 milyar atau sebesar (3,14 %). Gambaran tersebut diatas menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat masih menjadi penghela perkembangan ekonomi makro Kabupaten Purwakarta.
4.Potensi dan Peluang Investasi: >>> Memperhatikan karakteristik lokasi dan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Purwakarta, kegiatan-kegiatan ekonomi yang diharapkan mampu sebagai kegiatan utama (core business) yaitu agribisnis, industri, pariwisata dan perdagangan & jasa. Pengembangan 4 kegiatan utama Purwakarta dengan prioritas pengembangan sebagai berikut :

1) Agribisnis, sebagai core bisnis yang telah terbukti memiliki ketangguhan walaupun dalam kondisi ekonomi terpuruk. Selain itu, kegiatan agribisnis juga merupakan mata pencaharian utama dari sebagian besar penduduk Purwakarta. Namun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi dan perlu segera dilakukan perbaikan, antara lain : penataan kelembagaan, penguatan keterkaitan antar subsistem dan pengembangan komoditas unggulan antara lain manggis, rambutan, durian, pisang, sayuran dataran tinggi, peternakan ayam, sapi, domba, ikan nila, ikan mas, cengkeh, pala dan teh, pada kawasan sentra produksi Pasawahan, Pondok Salam, Kiarapedes, Wanayasa, Bojong Darangdan, Sukatani
2) Industri, sebagai core bisnis yang mampu mendorong secara kuat perkembangan ekonomi Purwakarta. Oleh karenanya, pengembangan industri perlu ditata melalui pemanfaatan bahan baku yang berbasis lokal (local content), pengembangan industri strategis (memiliki keterkaitan kedepan dan kebelakang), serta pengembangan industri yang memiliki daya saing (memiliki kekuatan secara ekonomi sehingga perlu dipertahankan keberadaannya). Komodita unggulan industri kecil dikembangkan yaitu industri makanan antara lain ; simping, gula aren Cikeris, kue kering, Tape

Singkong Bendul, dan manisan pala,; industri keramik, topi, dll. Disamping pengembangan industri kecil dan rumah tangga, juga pengembangan industri manufaktur yang diarahkan pada kawasan industri dan zona industri.
3) Pariwisata, sebagai core business mengingat potensi yang dimiliki purwakarta cukup beragam, namun demikian struktur pariwisata yang dikembangkan adalah parawisata yang berbasis agrowisata di wilayah Wanayasa dan sekitarnya dan ekowisata di kawasan sentra keramik serta wisata air/waduk di daerah Jatiluhur dan Maniis (Waduk Cirata), pengembangan situ bueleud dan situ wanayasa. Oleh karenanya kemasan paket wisata perlu ditata dalam bentuk sirkuit wisata dengan komoditas dan atraksi yang ditampilkan harus mempunyai daya tarik spesifik.
4) Perdagangan dan Jasa, core ini merupakan salah satu dari rangkaian aktivitas ekonomi yang difungsikan sebagai sub sistem pemasaran dan jasa terhadap proses dan hasil dari aktivitas produksi. Aspek lain yang mendukung terhadap pengembangan perdagangan dan jasa yaitu lokasi strategis Purwakarta sebagai penghubung utama Pusat Kegiatan Nasional Bandung-Jakarta dan Jakarta-Cirebon – Jateng. Oleh karenanya Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang bertepatan pada lokasi prioritas Pengembangan Barat perlu di kembangkan sebagai daerah business centre disamping daerah kota Purwakarta sendiri.

Sebagaimana kerangka pembangunan dengan menitik beratkan pada 4 (empat) kegiatan utama, sangat diperlukan investasi yang cukup besar. Oleh karenanya dalam meningkatkan investasi khususnya investasi swasta baik PMA maupun PMDN dan investasi masyarakat diperlukan adanya kebijakan pemerintah daerah yang seiring dengan kebijakan bidang penanaman modal (pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi).

5. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purwakarta
Ø Kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan daya tarik investasi secara umum :
a. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif
b. Meningkatkan kerjasama dan promosi investasi, di dalam dan luar negeri
c. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur, khususnya dalam rangka mempercepat pelaksanaan desentralisasi kewenangan investasi
e. Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang investasi
f. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan sntra dan cluster industri kecil dan kerajinan serta industri menengah yang mempunyai keterkaitan kebelakang maupun kedepan (backward dan forward linkage)
g. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan investasi
h. Mendorong tumbuhnya kegiatan investasi yang berbasis agribisnis, perdagangan dan jasa, pariwisata; serta industri yang berwawasan lingkungan, dan bersifat strategis (memiliki backward dan forward linkage) sehingga dapat medukung pertumbuhan kegiatan investasi dengan skala besar, menengah, dan kecil secara sinergis.
i. Mendukung peningkatkan kemampuan berbagai lembaga pelatihan ketenagakerjaan
j. Menjalin kerja sama dengan pengusaha untuk pelaksanaan proses magang para peserta pelatihan ketenagakerjaan
k. Memfasilitasi proses pembuatan peraturan perusahaan, perjanjian kerja, dan kesepakatan kerja bersama (KKB) antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja
l. Menjalin komunikasi dua arah antara pemerintah dengan pengusaha guna penyebarluasan informasi pasar/peluang kerja dan pencari kerja
m. Mendukung upaya-upaya guna peningkatan kesejahteraan pekerja.

Kebijakan penataan ruang sebagai berikut:
a. Penyediaan ruang yang diperuntukan sebagai kawasan industri seluas 2000 hektar, yaitu di Kecamatan Bungursari dengan luas sekitar 1000 hektar (sudah eksisting, dan dikenal dengan nama Kota Bukit Indah), dan 1000 hektar lagi direncanakan di Kecamatan Babakan Cikao.
b. Penyediaan ruang yang diperuntukan sebagai zona industri dengan luas sekitar 3000 hektar yang tersebar di Kecamatan Jatiluhur, Campaka, Cibatu, Bungusari, dan Sukatani.
c. Penyediaan ruang sebagai kawasan pariwisata seluas 9.250,77 hektar yang terdapat di Kecamatan Jatiluhur, beberapa kawasan lain yang tersebar di Kecamatan Wanayasa, Kiarapedes, Bojong dan Darangdan, serta kawasan pariwisata yang terdapat di sekitar Waduk Cirata yang akan dikembangkan secara bersama-sama dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung.
d. Pengembangan Kawasan Prioritas yang terdiri dari :
Kawasan Prioritas Bagian Barat yang dibagi menjadi 4 sub pusat pengembangan yaitu:
- Sub Pusat Cibungur, dengan luas 1.331,5 hektar diarahkan untuk kegiatan perkantoran pemerintahan, kesehatan, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa, sarana terminal, perumahan, hutan kota, terbuka hijau, Kuburan, prasarana. Daya tampung penduduk direncanakan sebanyak 188.570 jiwa.
- Sub Pusat Babakancikao, dengan luas 3.113 Ha pemanfaatan ruang kawasan ini diarahkan untuk kegiatan perkantoran pemerintahan, kesehatan, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa, sarana terminal, industri, perumahan, terbuka hijau, Kuburan, prasarana. Direncanakan menampung penduduk sebanyak 319.520 jiwa.
- Sub Pusat Mulyamekar, memiliki luas sebesar 1.125 Ha diarahkan untuk penggunaan lahan kesehatan, pendidikan, perdagangan dan jasa, sarana terminal, perumahan, terbuka hijau, Kuburan, dan prasarana. Direncanakan untuk menampung 149.400 jiwa.
- Sub Pusat Cikopo, dengan luas 1.546,5 Ha direncanakan untuk penggunaan lahan kesehatan, pendidikan, perdagangan dan jasa, industri, perumahan, terbuka hijau, dan prasarana. Penduduk yang akan ditampung direncanakan sebanyak 139.090 jiwa.

-	Sub Pusat Kota Bukit Indah Timur, meliputi area seluas 1.750 Ha, daya tampung dan arahan pemanfaatan ruang di sub pusat ini sebagai kawasan industri.

Pengembangan kawasan prioritas bagian barat akan didukung pembangunan jaringan jalan yang akan menghubungkan Cibungur – Cikaobandung – Kutamanah – Kertamanah – Sirnagalih Kabupaten Cianjur. (Jaringan jalan ini juga diharapkan bisa membuka akses bagi daerah yang berada di seberang Waduk Jatiluhur). Dan jaringan jalan yang menghubungkan Darangdan – Cilangkap – perbatasan ke Rajamandala.

- Kawasan Prioritas Bagian Timur yang dibagi menjadi 5 sub pusat pengembangan yaitu:
»	Sub Pengembangan Campaka; meliputi area seluas 1.546,23 Ha, diarahkan fungsinya sebagai pusat pengembangan kawasan prioritas bagian timur dengan pelayanan skala kawasan.
»	Sub Pengembangan Benteng; luas kawasan ini sekitar 807,48 Ha, ditetapkan sebagai sub pusat pengembangan dengan skala pelayanan desa-desa di sekitarnya.
»	Sub Pengembangan Cijunti; meliputi luas 1.922,99 Ha, diarahkan fungsinya sebagai sub pusat pengembangan yang melayani desa sekitarnya.
»	Sub Pengembangan Cibatu; luas kawasan ini sekitar 1.481,46 Ha, mempunyai fungsi sebagai pusat pelayanan desa sekitarnya.
»	Sub Pengembangan Cirangkong; dengan luas sekitar 3.610,69 Ha, fungsi yang diembannya sebagai sub pusat pengembangan dengan skala pelayanan desa-desa di sekitarnya.
Pengembangan kawasan prioritas bagian Timur akan didukung pembangunan jaringan jalan yang rencananya sebagai berikut :
-	Jalan Arteri Sekunder yaitu jalan yang menghubungkan kawasan ini dengan Subang ke arah timur dan menghubungkan Jakarta ke arah barat.
-	Jalan Kolektor Primer yaitu jalan yang memotong jalan arteri sekunder menghubungkan ke arah utara Cijunti, Cikopo dan ke arah selatan menghubungkan Wanawali dan Pasawahan.
-	Jalan Kolektor Sekunder yaitu jalan yang menghubungkan Cibatu – Cikadu dan Wanawali pada wilayah bagian selatan serta pada wilayah utara Ciparungsari – Cisaat – Cimahi – Cijunti.
Strategi dan kebijakan penataan ruang di atas telah dikaitkan pula dengan keberadaan pemanfaatan jalan tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (CIPULARANG) sepanjang 41 Km dan rencana pembangunan jalan tol dari Cikopo-Subang-Indramayu-Palimanan yang merupakan bagian dari jalan Tol Cirebon.

Kiat Keberhasilan Meningkatkan Daya Tarik Investasi

Aspek Kelembagaan:
a.	Review dan penyederhanaan mekanisme/proses perijinan melalui optimalisasi Peran Tim Koordinasi Pengendalian Ruang Daerah (TKPRD).
b.	Secara periodik menyelengarakan rapat teknis antar Tim perijinan (ijin lokasi, Site plan, HO, IMB, dll)
c.	Sosialisasi Peran TKPRD, Tim Ijin Lokasi dan instansi teknis yang memberikan/mengeluarkan ijin lainnya, termasuk mekanisme dan proses perijinan.
d.	Penataan kelembagaan/organisasi perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan basis pelayanan prima.

Aspek Sosial Politik:
a.	Meningkatkan peran masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan pembangunan melalui mekanisme partisipasi.
b.	Meningkatkan hubungan koordinasi antar pemangku eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pengambilan keputusan yang mempunyai dampak luas.
c.	Membangun publik opini sebagai respon komitmen masyarakat terhadap rumusan dan ketetapan kebijakan pemerintah daerah.
d.	Harmonisasi hubungan antara pelaku pembangunan (stakeholders) yaitu pemerintahan daerah, sektor swasta dan masyarakat.

Aspek Ekonomi Daerah:
a.	Pengkajian potensi ekonomi wilayah yang terkristalisasi sebagai core business yaitu agribisnis, industri, perdagangan dan jasa, dan pariwisata.
b.	Pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi (growth pole) sesuai dengan struktur ruang dan pola pemanfatan ruang. Purwakarta secara geografis terletak pada segi tiga emas Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Jakarta-Bandung dan Jakarta-Cirebon.
c.	Meningkatkan kerjasama antar pemerintahan daerah maupun antar pelaku ekonomi.
d.	Review perda-perda yang yang berkaitan dengan penarikan pajak dan retribusi sehingga mampu mendorong tumbuh berkembangnya usaha kecil, menengah dan besar

Aspek Tenaga Kerja dan Produktivitas:
a.	Meningkatkan peran Tripartit dalam mengkoordinasikan persoalan-persoalan ketenagakerjaan dan perburuan lintas pelaku (organisasi pekerja/buruh, perusahaan dan pemerintah daerah.
b.	Memfasilitasi forum pertemuan antara perusahaan dengan lingkungannya dalam pemanfaatan tenaga kerja setempat.

c. Kerjasama pemerintah daerah dengan perusahaan dalam hal rekruitmen, pelatihan/pemagangan, dan pembinaan serikat pekerja (penyuluhan peraturan perundangan ketenagakerjaan/perburuan).
d. Penyiapan calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar industri. (penyediaan tenaga produktif siap kerja).
e. Minimalisasi terjadinya kasus-kasus pemutusan hubungan kerja dan permasalahan ketenagakerjaan yang lain.

Aspek Infrastruktur:
a. Memfasilitasi penyediaan infrastruktur dalam suatu kawasan industri (jalan, telekomunikasi, listrik, dan Kebutuhan air)
b. Membangun, meningkatkan, dan pemeliharaan jalan yang menghubungan antara jalan kolektor ke jalan arteri maupun antar zona industri guna meningkatkan frekuensi dan percepatan pengangkutan.
c. Mengupayakan terdapatnya 4 interchange sebagai acsesrood yang terdapat pada kawasan pengembangan ekonomi (Cikopo, Cibungur, Jatiluhur dan Plered)
d. Memfasilitasi pengembangan terminal peti kemas, penyediaan terminal terpadu dan optimalisasi pemanfaatan kereta api melalui jalur double track.

4. Penutup

Gambaran pembangunan perekonomian regional diatas merupakan wujud prestasi dan harapan seluruh komponen masyarakat Purwakarta dan peran-serta pelaku pembangunan (stakeholders) baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang berkontribusi dalam membangunan perekonomian Purwakarta. Oleh karenanya kami sangat berharap peran investor tetap memberikan kepercayaannya dan terus melakukan investasi sesuai dengan potensi yang dimiliki Purwakarta, khususnya dalam pengembangan empat core business sebagai peluang investasi Purwakarta. Harapan ini tentunya tidak berlebihan mengingat struktur ruang dan anatomi wilayah purwakarta berada pada posisi segi tiga emas (jalur utama arah Jakarta- Bandung dan Jakarta-Cirebon-Jateng-jatim) sehingga Purwakarta mejadi daerah yang marketable, Profitable dan Sustainable dalam koridor mewujudkan kesejahteraan masyarakat (social welfare).